

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi politik yang terjadi, Indonesia mengubah sistem kehidupan dalam bernegara dan dituntut publik untuk lebih transparan dan akuntabel, agar tercipta tata pemerintah yang baik atau *good governance* dan terbebas dari Nepotisme, Korupsi, dan Kolusi. Dalam mewujudkan *good public governance* tersebut pemerintah melakukan suatu reformasi pada sektor keuangan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara dengan syarat pemerintah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dalam melaksanakan APBN/APBD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang di atas, pemerintah membentuk Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 mengenai kas menuju berbasis akrual. Pada tahun 2010 pemerintah mengesahkan SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dengan menggantikan SAP PP No. 24 Tahun 2005 mengenai kas menuju berbasis akrual, dengan adanya Standar Akuntansi yang baru maka diharapkan dapat terciptanya laporan keuangan yang relevan, reliabel, dan akuntabel dalam sektor pemerintahan.

Laporan Keuangan dalam instansi pemerintahan disusun dan disesuaikan dengan status instansi terkait, apakah instansi terkait termasuk entitas akuntansi

maupun entitas pelaporan. Berdasarkan SAP PP No.24 Tahun 2005 yang dilakukan oleh entitas akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sementara untuk entitas pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan pokok hanya empat macam yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan juga menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Kinerja Keuangan. Sedangkan, berdasarkan SAP PP No.71 Tahun 2010 yang dilakukan oleh entitas akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan ada lima jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sementara untuk entitas pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan ada tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dari macam-macam laporan keuangan diatas, Neraca merupakan komponen yang sangat penting dalam laporan keuangan yang berfungsi untuk menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang berkaitan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu, salah satu akunnya yang paling penting dalam Neraca yaitu Aset dikarenakan aset memiliki manfaat ekonomis bagi instansi pemerintah untuk masa yang akan datang. Aset menurut tingkat likuiditas dan juga dari masa manfaat dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar

dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang memiliki sifat sangat likuid dan memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun sedangkan aset tetap adalah aset yang memiliki tingkat likuiditas di bawah aset lancar memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan, aset yang tidak termasuk dalam kriteria aset lancar maupun aset tetap dapat digolongkan dalam aset lainnya.

Pengertian Aset tetap menurut Mulyadi (2001:593) merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi pemerintah dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan dapat diperoleh, memiliki fungsi dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan atau instansi pemerintah dan tidak memiliki maksud untuk dijual. Aset tetap yaitu aset yang berwujud, memiliki sifat yang relative permanent dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Maksud dari permanent yaitu dimana aset tersebut menunjukkan sifat agar dapat digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama atau jangka panjang (Baridwan, 1999:271).

Berdasarkan sifat aset tetap yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun atau dua belas bulan dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional organisasi maka aset tetap tersebut mengalami penurunan kualitas manfaatnya sehingga dapat memunculkan teori tentang depresiasi atau sering disebut penyusutan dan sering dilakukan perhitungan penyusutan dalam satu tahun atau satu periode.

Pengertian depresiasi atau penyusutan menurut SAP PP No.71 Tahun 2010 (PSAP No.7) adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap dan dapat disusutkan berdasarkan masa manfaat aset tetap terkait dengan nilai penyusutan

untuk setiap periode, aset tetap juga dapat diakui sebagai pengurang nilai yang tercatat pada neraca dan beban penyusutan terdapat pada Laporan Operasional. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis memilih judul **“PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR”**.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka tujuan yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perlakuan aset tetap pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur saat ini sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyajian aset tetap pada laporan keuangan dan pengeluaran yang terjadi selama masa manfaat aset tetap pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana metode penyusutan yang di terapkan pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan tugas akhir yaitu :

1. Manfaat bagi Instansi terkait :
 - a. Sebagai masukan dan perbaikan yang kemungkinan bermanfaat bagi instansi dalam hal penerapan SAP PP No. 71 Tahun 2010 khususnya aset tetap untuk yang akan datang.

- b. Untuk memberikan kritik dan saran yang membangun agar dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
2. Manfaat bagi Mahasiswa :
 - a. Menambah pengetahuan dalam penyajian, pengakuan, dan pengungkapan aset tetap pada instansi pemerintahan.
 - b. Dapat mengembangkan atau menerapkan materi yang telah diterima selama berada di bangku perkuliahan.
3. Manfaat bagi Pembaca :
 - a. Untuk informasi dalam penelitian agar memperluas wawasan pada instansi pemerintah
 - b. Untuk digunakan sebagai pembandingan dalam melakukan penelitian pada waktu yang akan datang.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Ruang lingkup yang dimaksud untuk berfokus dalam pokok tujuan, hal ini bermaksud agar penulis lebih mudah melakukan pembahasan supaya lebih terarah. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji tentang penyajian, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan aset tetap yang diterapkan pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dan unsur-unsur yang terkait di dalamnya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal yang paling penting dalam penulisan laporan agar dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh merupakan data yang benar, lengkap, dan relevan. Dalam

penelitian penulis akan menggunakan metode pengumpulan data seperti mencakup metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah penjelasannya:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengambil arsip atau dokumen yang berkaitan dengan sistem akuntansi yang dapat memperkuat data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir.

1. Bagaimana gambaran umum Inspektorat Provinsi Jawa Timur
2. Apa Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Timur
3. Bagaimana struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur

2. Wawancara

Wawancara melibatkan peneliti dalam pengumpulan data dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada Pimpinan atau pihak yang berkaitan langsung dengan masalah perlakuan aset tetap dalam laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang diharapkan. Metode wawancara ini terdapat tiga macam adalah sebagai berikut:

1. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik untuk pengumpulan data apabila peneliti mengetahui informasi yang akan diperoleh dan peneliti juga harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dipertanyakan.

2. Wawancara semiterstruktur yaitu wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuannya yaitu untuk menentukan permasalahan yang lebih terbuka dan pihak yang akan diwawancara untuk diminta pendapatnya. Untuk melakukan wawancara ini peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
3. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dan dalam pengumpulan datanya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semiterstruktur agar pemberi informasi (Informan) lebih terbuka dalam hal penyampaian informasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ibu Primasari yang merupakan staff subbag bagian keuangan dan Bapak Kevin selaku pemegang daftar aset tetap di Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi dalam aset tetap.
2. Bagaimana pengungkapan aset tetap.
3. Bagaimana penilaian dan penyajian aset tetap.
4. Bagaimana penyusutan aset tetap yang digunakan.
5. Bagaimana pengeluaran setelah perolehan aset tetap.
6. Bagaimana pelepasan yang digunakan dalam aset tetap.